



## Rp 1,3 Triliun untuk Perbaiki Ruas Jalan di Kalbar

**PONTIANAK, TRIBUN** - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Sy Abdullah Alkadrie mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 1,3 Triliun untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan di Kalbar.

Alokasi anggaran tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme Inpres Pembangunan Jalan Daerah oleh Presiden Joko Widodo pada 2023 ini.

"Mekanisme Inpres Pembangunan Jalan Daerah itu memang sudah kita bahas sejak 2022 lalu dalam APBN dan tahun 2023 ini sudah akan digulirkan," ujar Sy Abdullah, Rabu (1/3).

Ia mengatakan total alokasi anggaran Inpres jalan daerah sebesar Rp 32,7 yang baru bisa dialokasi, dari Rp 80 T yang diper-

lukan. Kalimantan Barat tahun ini kebagian Rp 1,3 Triliun muda2han saat

■ Bersambung ke hal. 7

## Rp 1,3 Triliun untuk Perbaiki Ruas Jalan di Kalbar

Sambungan Hal.1

fenalnya nanti bisa lebih untuk perbaikan jalan daerah baik status Jalan Kabupaten maupun Jalan Provinsi.

Legislator Partai Nasdem itu mengatakan bahwa Inpres percepatan pembangunan jalan daerah itu tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat di Kalbar yang selama ini mendambakan perbaikan ruas jalan baik di tingkat Kabu-

paten maupun Provinsi.

"Mungkin selama ini Pemkab dan Provinsi memiliki keterbatasan anggaran untuk pembangunan Infrastruktur, adanya Inpres ini akan membantu daerah untuk meningkatkan kualitas ruas-ruas jalan yang ada," paparnya.

Ia mengatakan penentuan jalan yang akan dibangun tersebut dengan

memperhatikan bahwa jalan tersebut menjadi penghubung untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan akses pariwisata potensial.

Sy Abdullah mengharapkan agar proses pengerjaan jalan-jalan tersebut dapat segera dilakukan. Asumsinya dari total anggaran tersebut akan ada lebih dari 40 lebih ruas jalan dengan panjang yang

bervariasi yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Kalbar.

"Saya berharap Inpres ini bisa diawasi dalam pelaksanaannya. Ada sekian puluh ruas jalan di Kalbar akan ditangani dapat berjalan dengan kualitas yang terbaik," ujarnya. "Kita minta juga saat pelaksanaannya tidak asal, artinya dilaksanakan secara baik. Ini pure untuk Kalimantan Barat," ujarnya. **(dan)**